PERSPEKTIF *GOVERNANCE* DALAM PERKEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA TAHUN 2003-2020

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah

disusun oleh:
JUNIOR HENDRI WIJAYA
19610058

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "AMPD"
YOGYAKARTA
2022

PENGESAHAN

TESIS
PERSPEKTIF *GOVERNANCE* DALAM PERKEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA TAHUN 2003-2020

Oleh:
JUNIOR HENDRI WIJAYA
19610058

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal, 14 Februari 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)
Dr. Sutoro Eko Yunanto

Penguji I
Dr. Yuli Setyowati, M.Si

Penguji II
Dr. Supardal, M.Si

Yogyakarta, 14 Februari 2022
Mengetahui
Direktur Program Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JUNIOR HENDRI WIJAYA

NIM : 19610058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **PERSPEKTIF *GOVERNANCE* DALAM PERKEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA TAHUN 2003-2020** adalah karya saya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan

JUNIOR HENDRI WIJAYA

NIM: 19610058

MOTTO

“

Percayalah! Pertolongan-Nya selalu hadir pada waktu yang tepat

...

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.”

(QS Al Ankabut : 64)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk 2 wanita yang saya Sayangi dan Cintai

Ibu, *wanita yang kuat, sabar, selalu mendukung cita-cita penuh dengan do'a untuk anaknya.*

Iman Amanda, *Pasangan hidup saya, yang selalu siap hadir di setiap waktu dan selalu menemani untuk berjuang bersama dalam proses.*

Bapak, *selaku dewan penasehat yang tak lupa mengingatkan untuk kebaikan anaknya.*

Tak lupa, teruntuk ***Bunda*** *dan* ***Ayah.***

orang tua kedua saya yang selalu siap mendo'akan dan mendukung harapan saya dan istri.

Khalid Haaziq Ghibran,

Teruntuk anak pertama saya yang membawa keberkahan, penerangan semangat dalam hidup.

…..

Dan Tidak Lupa, dipersembahkan untuk keluarga, dan sahabat-sahabat saya.

Salam terkasih untukk semua, sehat selalu.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang oleh karenanya tesis dengan judul "***Perspektif Governance Dalam Perkembangan E-Government Di Indonesia Tahun 2003-2020***" dapat diselesaikan. Rahmat, ridha dan pertolongannya merupakan sebuah kekuatan dan karunia yang tidak terhingga dalam penyelesaian tesis. Karya ini adalah persyaratan untuk lulus dan memperoleh derajat atau gelar master pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyatakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Tentu dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan, dan doa dari banyak pihak. Maka, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyatakat Desa "APMD" Yogyakarta, yang juga merupakan pembimbing tesis penulis, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto. Berkat bimbingan, arahan, dan dorongan beliau penulis dapa menyelesaikan tesis ini tanpa terkendala.
2. Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyatakat Desa "APMD" Yogyakarta, Dr. Supardal, M.Si.
3. Tim Penguji, Dr. Yuli Setyowati, M.Si dan Dr. Supardal, M.Si.
4. Pengelola, dosen dan tenaga pendidik program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyatakat Desa "APMD" Yogyakarta yang selama saya menempuh pendidikan terus membantu, membimbing dan juga memberikan arahan.

5. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta angkatan 24, yang selama menempuh pendidikan selalu kompak dan saling mendukung satu sama lainnya. Semoga rekan-rekan semakin sukses kedepannya.
6. Rekan-rekan The Journal Publishing, RJI, IdtripHighlight, yang mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas negara.
7. Kakak (Ardi Sudiawan) dan Ayuk (Nina Chandra Yani) tersayang yang selalu mendukung penuh, atas perjuangan adiknya.
8. Saudara Andri P.K yang mendukung, membantu saya dalam berdiskusi masalah penelitian, dan berkontribusi secara moril dan materiil.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menyertai dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
10. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tesis saya, baik secara moril ataupun materi.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Junior Hendri Wijaya

INTISARI

Perkembangan *e-government* berhubungan erat dengan pelaksanaan *governance* khususnya di negara Indonesia, untuk melihat perkembangan tersebut maka diperlukan adanya kajian penelitian tentang perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perkembangan *e-government* di Indonesia dan menggambarkan perspektif *governance* yang melatarbelakangi pelaksanaan *e-government*. Fokus utama dala penelitian ini adalah ***P***erkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020 dan perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi pustaka, dengan objek dalam penelitian ini adalah perkembangan *e-government* di Indonesia ditinjau dari perspektif *governance*. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi perkembangan *e-government* di Indonesia belum maksimal, tetapi memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. *Telecommunication Infrastructure Index* Indonesia selalu menjadi komponen dengan nilai terendah, sedangkan HCI selalu menunjukkan nilai tertinggi, Indonesia memenuhi elemen *support* dalam konsep digitalisasi sektor publik, tetapi elemen *capacity* dan *value* tidak dapat dipenuhi. Perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia, partisipasi Indonesia berada pada jenis partisipasi langsung, dan kendala pelaksanaan *e-government* dalam kerangka *governance* terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, arahan yang kurang sempurna, perbedaan pemahaman tentang cara kerja *e-government*, dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait perubahan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan pelaksanaan *e-government*. Jenis *governance* di Indonesia dalam pelaksanaan *e-government* adalah jenis tata kelola yang kaku, dengan kapasitas adaptif pemerintahan atau tata kelola yang memiliki eksploitasi tinggi, tetapi eksplorasi rendah.

Kata Kunci: *Governance*; Perkembangan *E-government*; Indonesia.

ABSTRACT

The development of e-government is closely related to the implementation of governance, especially in Indonesia, to see these developments it is necessary to have a research study on the perspective of governance in the development of e-government in Indonesia in 2003-2020. The purpose of this study is to describe the development of e-government in Indonesia and describe the governance perspective that underlies the implementation of e-government. The main focus of this research is the development of e-government in Indonesia in 2003-2020 and the perspective of governance in the development of e-government in Indonesia.

The method used in this research is qualitative with literature study, with the object in this research is the development of e-government in Indonesia in terms of governance perspective. This study uses secondary data sources from journal articles, news, books, and related documents. The data analysis technique used in this research is content analysis.

The results of the study show that the conditions for the development of e-government in Indonesia have not been maximized, but have the potential to continue to develop in the future. Indonesia's Telecommunication Infrastructure Index has always been the component with the lowest value, while HCI always shows the highest value. Indonesia has fulfilled the support element in the concept of digitizing the public sector, but the capacity and value elements cannot be fulfilled. From a governance perspective in the development of e-government in Indonesia, Indonesia's participation is in the type of direct participation, and obstacles to implementing e-government within the governance framework occur due to a lack of public trust in the government, imperfect directions, different understandings of how e-government works, and challenges that must be faced by the government related to changes in governance systems that are adapted to the implementation of e-government. The type of governance in Indonesia in the implementation of e-government is a rigid type of governance, with adaptive capacity of government or governance that has high exploitation, but low exploration.

Keywords: *Governance; e-government Development; Indonesia.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-government merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Menurut (Yovita, 2016) kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka pemerintah dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Negara maju dan negara berkembang hingga saat ini masih terus melaksanakan pengembangan *e-government* sesuai dengan karakteristik negara masing-masing, seperti negara Kolombia, Kenya, India, Malaysia, Amerika, Palestina, Korea Selatan yang telah berhasil mengembangkan dan menerapkan *e-government* dan sebaliknya negara yang tidak berhasil dalam mengembangkan dan menerapkan *e-government* adalah Mozambique dan Uganda. Hal ini diukur menurut manfaat yang telah dirasakan masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan *e-government* (Jayanti, 2018). Merujuk pada (Zainal A Hasibuan,

2007) menjelaskan bahwa perkembangan *e-government* di negara-negara Asia sudah selangkah lebih maju daripada Indonesia. Sejak tahun 2001 Malaysia telah menerapkan *e-government* untuk sistem kependudukannya dengan mengeluarkan kartu identitas yang bernama MyKad. MyKad adalah *government multi-purpose card* yang ditangani oleh lima agensi pemerintahan Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementrian Kesehatan, Jabatan Keimigrasian (Thomas, 2004).

Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* menyebutkan bahwa manisfestasi keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Pemerintah menginstruksikan kepada pejabat lembaga pemerintahan termauk gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah pelaksanaan *e-government* secara nasional, merumuskan, dan melaksanakan rencana tindak lanjut dan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, serta melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan *e-government* berkaitan erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Konteks pemerintahan saat ini, penyelenggaraan *e-government* atau kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Adapun dalam program prioritas, *e-government* merupakan satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.

Sektor pertama mendapatkan prioritas adalah *e-government*, kemudian sektor e-kesehatan, sektor e-pendidikan, sektor e-logistik dan yang kelima sektor e-pengadaan (KOMINFO, 2016).

Masyarakat luas dapat mengakses semua informasi pemerintah dan layanan melalui sebuah website yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari elemen *e-government* yang memberikan keuntungan operasional dan implementasi *e-government* bagi pemerintahan dan perusahaan sektor publik. Contohnya adalah pengurangan penggunaan kertas, menyediakan layanan yang tersedia untuk pelanggan, mengurangi waktu respon dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan *e-government* untuk masyarakat. Namun, *e-government* ini masih memiliki hambatan dalam layanan masyarakat, padahal *e-government* sudah mengeluarkan biaya besar dan waktu yang cukup lama (Hendysalim, 2014).

Menurut (Silalahi et al., 2015) juga menyampaikan bahwa inisiatif *e-government* sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sebagian lembaga pemerintah hanya berada pada tahap awal pengembangan *e-government*, yaitu tahap persiapan. Sedangkan sebagaian kecil lainnya mencapai tahap pematangan. juga menganggap bahwa sebetulnya hal tersebut memperlihatkan belum adanya arah pembentukan *e-government* yang baik dan *e-government* yang berkembang dilakukan hanya sebagai bentuk pemenuhan terhadap sebuah kebijakan tanpa diikuti kualitas.

Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun *e-government*. Hal ini terlihat pada pemerintah daerah di Indonesia yang berkompetisi dalam penerapan *e-government* baik ditingkat

pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun setelah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota membangun *e-government* muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan *e-government* di tingkat daerah tersebut, yaitu (ppid.sumbarprov.go.id, 2017):

1. Aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam;
2. Belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah;
3. Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi;
4. Kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah;
5. Belum adanya pusat data (data center);
6. Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi.
7. Sebagian hak cipta di pegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi;

Permasalahan tersebut di atas menjadikan pegembangan dan pengelolaan *e-government* menjadi tidak efektif dan efesien sehingga harus segara diatasi, karena *e-government* seharusnya optimal bisa menjadi sarana pemerintah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga pertumbuhan

ekonomi masyarakat akan meningkat dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membebani perekonomian. Oleh karenanya *e-government* haruslah menjadi salah satu pranata yang dapat menguatkan kemampuan perekonomian Indonesia dan bukan malah menambah masalah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam implementasi *e-government* perlu di ketahui agar ditemukan solusi untuk membuat semua proses pemerintahan menjadi terkomputerisasi. Selanjutnya berfokus pada perkembangan *e-government* bahwa memiliki empat model pelaksanaannya, model tersebut adalah *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), *Government to Government* (G2G), dan *Government to Employee* (G2E). Berdasarkan penjelasan (Setiawan, 2017a) tentu empat model ini memiliki keterkaitan dalam perkembangan *e-government*. Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perkembangan *e-government.* Pada penelitian (Novita, 2014) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat pengembangan *e-government* di antaranya adalah sumber daya manusia, infrastruktur dan kendala organisasi. Sedangkan untuk pengembangan *e-government* di tingkat pemerintah kota, khususnya Palembang, yang menjadi hambatan adalah lemahnya kepemimpinan, kelangkaan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, ketidakseimbangan digital dan pengaturan yang lemah. Pelaksanaan *e-government* terdapat ketidaksinkronan antara tujuan kegiatan dengan tujuan kegiatan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat (*e-government)* (Putra et al., 2018). Permasalahan lain yang menjadi contoh adalah pada *website* Pemerintah Kabupaten Jombang

yang dapat dikatakan efektif dalam memberikan informasi secara meluas. Akan tetapi, dalam pemberian layanan secara elektronik, belum dapat dikatakan efektif (Aprilia et al., 2014).

Penelitian Bwalya and Mutula (2016), mengatakan bahwa desain *e-government* perlu disesuaikan dengan karakteristik kontekstual yang unik di daerah di mana ia diterapkan. Selain itu, implementasi *e-government* harus mempertimbangkan semua aspek yang berbeda-beda, seperti aspek sosial ekonomi, dan konseptualisasi manajerial. Menurut (Aminudin and Putra, 2017) diperlukan adanya komitmen dalam melaksanakan pengembangan *e-government*, yaitu komitmen antara pimpinan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini karena tujuan utama *e-government* adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diperuntukan bagi masyarakat, sehingga kesejahteraannya dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, (Napitupulu, 2015) membahas Tentang 50 faktor kesuksesan penerapan *e-government* yang menjadi prioritas dan fokus Pemerintah Daerah dalam pengaplikasian *e-government.*

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa dalam konsep pengembangan *e-government*, di Indonesia terdapat 83 Pemerintah Daerah masih berada dalam tahap persiapan, 341 dalam tahap pematangan, 115 dalam tahap pemantapan dan 4 daerah dalam tahap pemanfaatan (Yunita and Aprianto, 2018). Porumbescu (2016) melihat dari perspektif penggunaan media sosial. Porumbescu (2016), melihat dari perspektif penggunaan media sosial, bahwa media sosial dianggap

lebih efektif dalam meningkatkan hubungan warga dengan pemerintah daripada dengan menggunakan bentuk *e-government* lain seperti website resmi pemerintah.

Peneliti melakukan visualisasi penelusuran kajian menggunakan *tool Vos Viewer* dan *Publish or Perish* sebagai alat untuk melihat berapa banyak kajian-kajian yang melakukan penelitian tentang perkembangan *e-government* dan *governance khususnya di Indonesia*. *Vos Viewer* digunakan untuk memvisualkan bibliografi, atau data set yang berisi *field bibliografi* (judul, pengarang, penulis, jurnal, penerbit). Dalam dunia penelitian, VV digunakan untuk analisis *bibliometric*, mencari topik yang masih ada peluang diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu dan lainnya (Jan van Eck and Waltman, 2013). Sementara itu, *Publish or perish* dirancang untuk membantu individu ataupun akademisi untuk mencari dan manganalisis sumber informasi yang dibutuhkan (Aulianto et al., 2019). Kembali pada pokok pemetaan peneliti yang dapat dilihat pada **gambar 1.1** dan **gambar 1.2**:

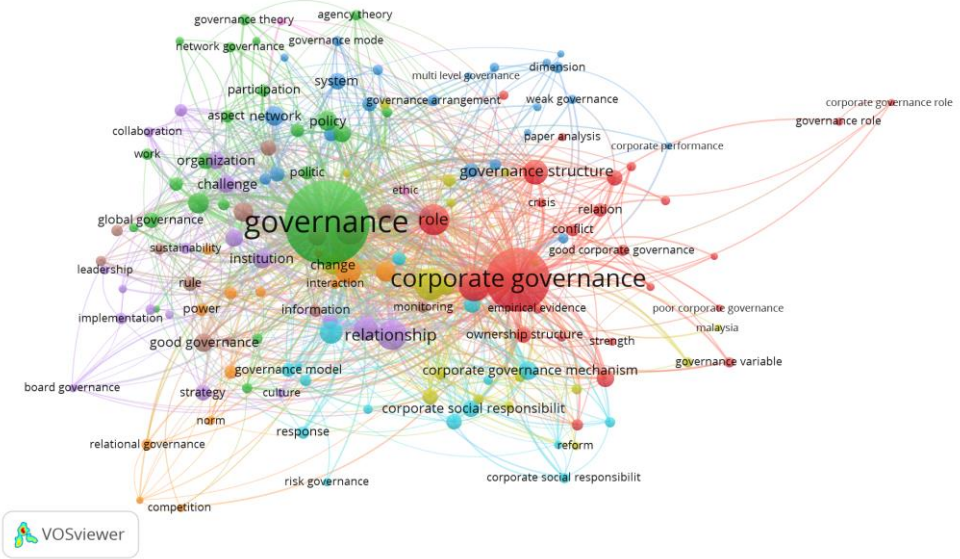

Gambar 1. 1 Pemetaan riset tentang *governance* tahun 2003-2020

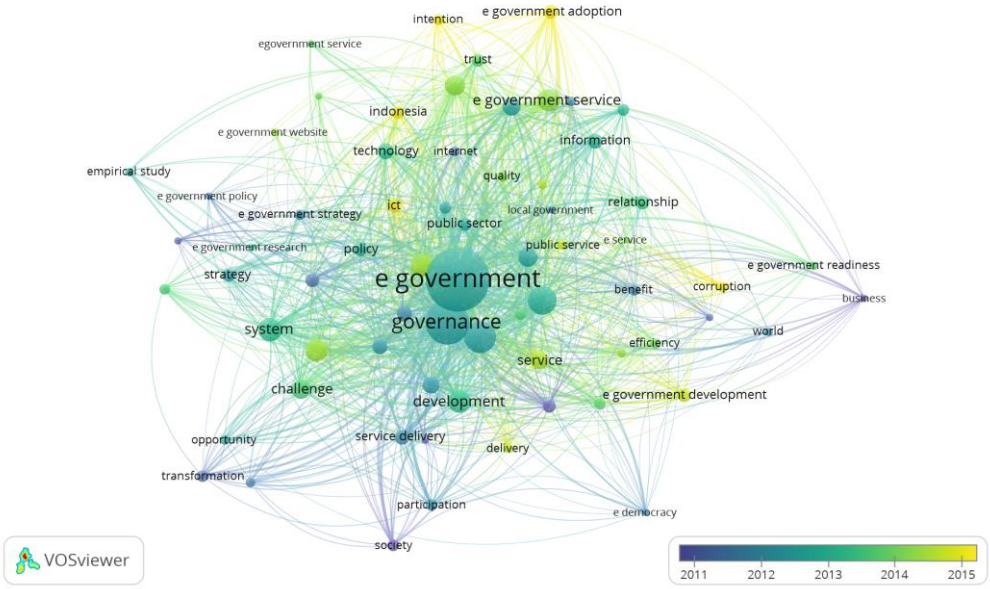

Gambar 1. 2 Pemetaan riset tentang *e-government* tahun 2003-2020

Tabel 1. 1 Pemetaan penelitian berdasarkan riset tentang *governance* dan *e-government* tahun 2003-2020

NO	Kata kunci	Jumlah Paper	Dominan Pembahasan
1	*Governance*	995	*corporate governance*
2	*E-government*	996	*governance*

Berdasarkan tabel 1.1 dari hasil penelusuran data jurnal menggunakan *Publish or perish*, gambar 1.1 menunjukan topik *governance* yang ditarik peneliti dengan jumlah 995 paper dan dari tahun 2003-2020. Penelitian tentang *governance* lebih mendominasi pada pembahasan *coorporate governance* dibandingkan dengan *e-government*. Pada gambar 1.2 menggambarkan bahwa kajian tentang *e-government* yang berkaitan dengan *governance* pada tahun 2015 sampai tahun 2020 masih tergolong sedikit dibandingkan pada tahun 2011-2014.

Sehingga perlu dilakukan kajian tentang perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020.
2. Perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020.

C. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020?
2. Bagaimana perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan perkembangan *e-government* di Indonesia;
2. Untuk menggambarkan *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020;

2. Memberikan masukan bagi organisasi yang bersangkutan mengenai perspektif *governance* pada pelaksanaan dan perkembangan *e-government* di Indonesia;
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintahan daerah-daerah lain dalam pelaksanaan dan pemanfaatan *e-government*.

F. Kerangka Konseptual

1) Pemetaan Studi-Studi Terdahulu

Peneliti memulai menjelaskan tentang perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020 dengan melakukan pemetaan studi-studi terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Berikut tabel 1.2 Pemetaan studi-studi terdahulu:

Tabel 1. 2 Pemetaan Studi –Studi Terdahulu

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	(Novita, 2014) Faktor-faktor penghambat pengembangan *e-government*: Studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan Dipublikasikan di J. Eksplora Inform. 4, 43–52	- Faktor-faktor yang menghambat pengembangan *e-government* di antaranya adalah sumber daya manusia, infrastruktur dan kendala organisasi. - Sedangkan untuk pengembangan *e-government* di tingkat pemerintah kota, khususnya	Sama-sama meneliti tentang *e-government*.	Subjek penelitian berbeda. Jika penelitian ini di Palembang maka penelitian saya di Indonesia. Sehingga fokus kajiannya pun berbeda karena saya meneliti tentang perkembangan *e-government* di Indonesia yang

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Palembang, yang menjadi hambatan adalah lemahnya kepemimpinan, kelangkaan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, ketidakseimbangan digital dan pengaturan yang lemah.		ditinjau dari model implemetasi dan pemanfaatan oleh masyarakat Indonesia.
2	(Putra et al., 2018) *Tactical steps for E-government development* Dipublikasikan di Int. J. Pure Appl. Math. 119, 2251–2258	Penyebab dari keadaan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan antara tujuan kegiatan dengan tujuan kegiatan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat (*e-government).* Konsep pengembangan *e-government* antara lain *Goverment to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *and Government to*	Sama-sama membahas *e-government yang mengkaitkan dengan 4 model implementasi e-government.*	Pada penelitian ini dibahas mengenai konsep. Sedangkan di penelitian peneliti ada pada persoalan tahapan pengembangan. Cara penelitian pun berbeda karena di penelitian saya, saya fokus pada teori model pelaksanaan *e-government*.

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Citizens (G2C).		
3	(Bwalya and Mutula, 2016) *A conceptual framework for E-government development in resource-constrained countries: The case of Zambia* Di publikasikan di Inf. Dev. 32, 1183–1198	- Desain *E-government* perlu disesuaikan dengan karakteristik kontekstual yang unik di daerah di mana ia deterapkn. - Implementasi *E-government* harus mempertimbangkan semua aspek yang berbeda-beda, seperti aspek sosial ekonomi, dan konseptualisasi manajerial.	Sama-sama meneliti *e-government* dengan melihat kejadian atau disesuaikan dengan karakteristik unik di daerah.	Penelitian ini fokus pada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam implementasi. Sedangkan penelitian saya tentang tahapan-tahapan pengembangan.
4	(Aminudin and Putra, 2017) Langkah–Langkah Taktis Pengembangan *E-government* untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pringsewu Dipublikasikan di J. TAM Technol. Accept. Model 3,	Diperlukan adanya komitmen dalam melaksanakan pengembangan *e-government*, yaitu komitmen antara pimpinan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini karena tujuan utama *e-government* adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diperuntukan bagi masyarakat, sehingga	Sama-sama meneliti pengembangan *e-government* dari sisi pemanfaatan masyarakat.	Penelitian ini ingin menunjukan komitmen antara pimpinan daerah dengan teknologi informasi. Sedangkan penelitian saya ingin melihat posisi penerapan *e-government* melalui kualitas informasi di website pemerintah

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	59–66	kesejahteraannya dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah.		
5	(Napitupulu, 2015) Kajian Faktor Sukses Implementasi *E-government*, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor Dipublikasikan di SISFO 5.	Terdapat 50 faktor kesuksesan penerapan *e-government* yang menjadi prioritas dan fokus Pemerintah Daerah dalam pengaplikasian *e-government*.	Sama-sama mengkaji *e-government* yang melihat keberhasilan pemerintah dalam penerapannya.	Lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini di bogor sedangkan penelitian saya di Indonesia. Penelitian bukan ingin melihat faktor kesuksesan yang menjadi prioritas, tetapi ingin melihat sejauh mana *e-government* dapat diterapkan di Indonesia.
6	(Yunita and Aprianto, 2018) Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan *E-government* di Indonesia: Analisis Website	Dalam konsep pengembangan *e-government*, di Indonesia terdapat 83 Pemerintah Daerah masih berada dalam tahap persiaan, 341 dalam tahap pematangan, 115 dalam tahap	Sama-sama meneliti pelaksanaan pengembangan *e-government*	Penelitian ini dilakukan secara luas di seluruh Indonesia dengan metode dokumentasi dan pustaka. Sedangkan penelitian lebih spesifik dilakukan

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Dipublikasikan di Semin. Nas. Teknol. Inf. Dan Komun. 329–336	pemantapan dan 4 daerah dalam tahap pemanfaatan.		di DIY dengan kebaharuan waktu pelaksanaan penelitian.
7	(Aprilia et al., 2014) Efektivitas Website Sebagai Media *E-government* dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang) Dipublikasikan di WACANA J. Sos. Dan Hum. 17, 126–135	- Menganalisis faktor penghambat dan pendukung efektifitas *website* sebagai media *e-government.* - *Website* Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dikatakan efektif dalam memberikan informasi secara meluas. Akan tetapi, dalam pemberian layanan secara elektronik, belum dapat dikatakan efektif.	Sama-sama meneliti website pemda untuk melihat penerapan *e-government*	Objek penelitian berbeda, penelitian di Indonesia. Selain itu fokus penelitian pun berbeda. Peneliti menulis tentang sampai tahap mana *e-government* dilaksanakan. Sedangkan pada penelitian ini hanya mengkaji faktor penghambat dan pendukungnya.
8	(Porumbescu, 2016)	Sosial media dianggap lebih efektif dalam meningkatkan	Sama-sama meneliti pengembangan *e-*	Penelitian ini fokus pada empat model

NO	PENULIS	TEMUAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Linking public sector social media and E-government website use to trust in government Dipublikasikan di Gov. Inf. Q. 33, 291–304	hubungan warga dengan pemerintah daripada dengan menggunakan bentuk *e-government* lain seperti website resmi pemerintah.	*government*	pelaksanaan *e-government.*
9	(Kamoun and Basel Almourad, 2014) *Accessibility as an integral factor in E-government website evaluation: The case of Dubai E-government* Dipublikasikan di Inf. Technol. People 27, 208–228	Terdapat korelasi yang lemah antara skor peringkat situs web *e-government* dan aksesibilitias situs web.	Meneliti proses pengembangan *e-government* melalui situs web.	Objek penelitian berbeda dan penelitian saya mencoba menggali pada tahapan mana *e-government* berhasil diterapkan.

Berdasarkan hasil pemetaan studi penelitian-penelitian di atas belum membahas mengenai perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government*,

sehingga adanya peluang peneliti dalam melakukan penelitian tentang perspektif *governance* dalam perkembangan *e-government* di Indonesia tahun 2003-2020.

2) *E-government*

Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Setiawan, 2017b).

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

Secara umum pengertian *electronic government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya.

E-government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu (kominfo.kotabogor.go.id, 2014):

a) Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
b) Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui *e-mail*.
c) Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
d) Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Menurut Indrajit dalam (Aprianty, 2016), penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik harus memiliki tiga elemen sukses. Pertama, elemen *Support*, dimana dalam hal ini pengembangan *e-government* memerlukan dukungan atau *political will* dari pejabat publik. Kedua, elemen *Capacity*, adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government* agar tujuan yang ditetapkan dapat terlaksana. Setidaknya terdapat tiga sumber daya yang dibutuhkan, yakni sumber daya finansial yang cukup, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli. Ketiga, elemen *Value* yang menjadi penentu besar atau tidaknya kebermanfaatan *e-government.* Dalam hal ini, yang menjadi penentu adalah masyarakat sebagai penerima layanan.

3) Implementasi *e-government*

Menurut Sosiawan (2020), ada beberapa faktor yang menghambat berkembangnya *E-Government* dalam pemerintahan Indonesia, antara lain:

a) Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi *e-government* dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang *riil* dan ideal. Artinya walapun undang-undang, peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan "ngambang'.

b) Belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi *skill* dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda sehinga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan *e-government*.

c) Penetrasi pasar *hardware* dan *provider* layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah-daerah, sehingga bukan hanya masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT.

d) Masih belum meratanya *Literacy* masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan *e-government* karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah.

Menurut (Kurniawan, 2006) beberapa hambatan yang dialami dalam implementasi *e-government* dapat dinilai dari beberapa aspek. Adapun aspek-aspek tersebut didapatkan dari hasil pengamatan Kementrian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih terkendala dalam aspek-aspek berikut ini:

a) *E-leadership*

   Prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

b) Infrastruktur Jaringan Informasi

   Kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

c) Pengelolaan Informasi

   Kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.

d) Lingkungan Bisnis

   Kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi.

e) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

   Difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Berdasarkan Kurniawan (2006) juga menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan pembentukan *e-government* di Indonesia, antara lain:

a) Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah;

b) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government;

c) Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi,otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian.

d) Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

4) Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan *E-government*

Menurut Kaligis et al., dalam Sugiyah (2021) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Dwiningrum, 2011) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu.

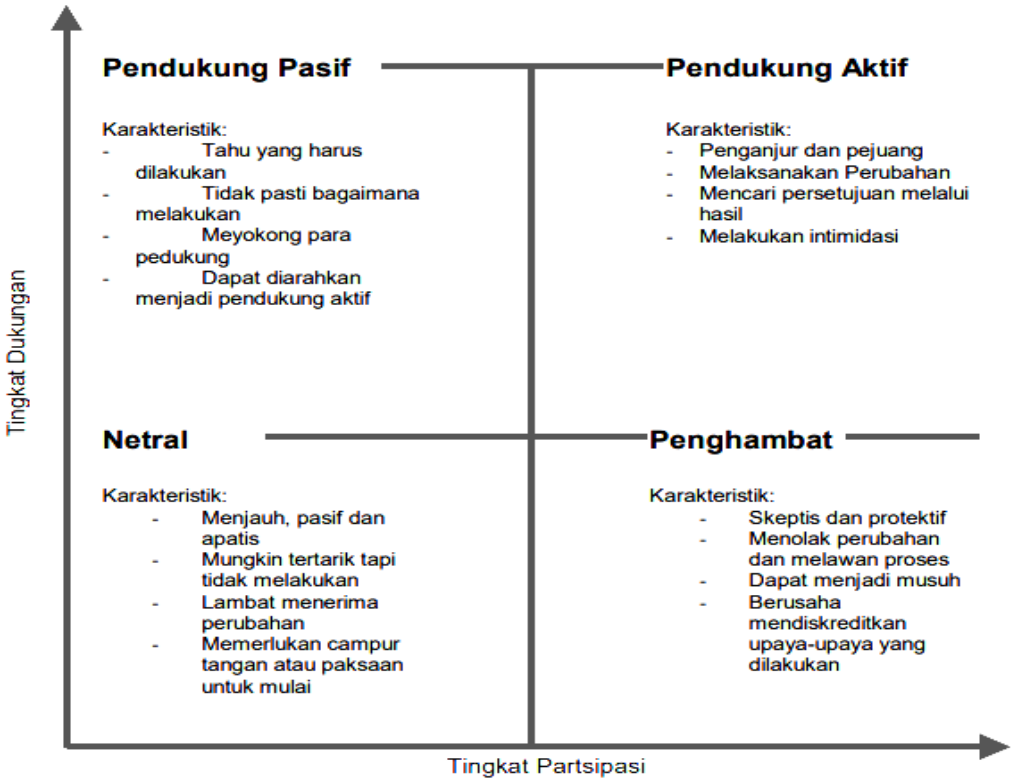

Gambar 1. 3 Empat Golongan Perubahan Paradigma Berpikir Sehubungan Dengan Penerapan *E-government* Menurut Warren Bennis dan Michael Mische)

Sumber: (Kumurur et al., 2008)

5) Manfaat *E-government*

Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-government*, yaitu masing-masing adalah: Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dankalangan lain yang berkepentingan *(stakeholder)*; dimana Melibatkan penggunaan teknologiinformasi (terutama internet); dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e-government*,yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair dalam (Organ, 2003) telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-governmnet* bagi suatu negara, antara lain:

a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, danakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.
b) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yangdikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

c) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

d) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepatmenjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.

e) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal (Bambang Irawan, 2017):

a) Layanan Masyarakat

Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

b) Hubungan antara Pemerintah

Masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidak percayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

c) Pemberdayaan Masyarakat melalui Informasi

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.

d) Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien

Adanya E-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.

6) *Governance*

Menurut Kooiman and Bavinck (2005), pendekatan tata kelola memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan penting antara manajemen, pembuatan kebijakan, dan tata kelola. Perbedaan-perbedaan ini jelas bervariasi menurut budaya dan bahasa. Tata kelola merupakan istilah yang lebih inklusif, diikuti oleh kebijakan, dan terakhir oleh manajemen. Tata kelola mampu melampaui masalah yang ada guna memberikan pertimbangan tren dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Tata kelola juga tidak membatasi diri pada sektor tertentu. Akan tetapi, mampu menanggapi isu sektoral sebagai cerminan keadaan yang lebih umum.

Jika dilihat dari kaca mata administrasi publik dan kebijakan, maka tata kelola pemerintahan didefinisikan sebagai (Rhodes, 2007):

a) Saling ketergantungan antar organisasi. Tata kelola pemerintahan yang lebih luas mencakup aktor non-negara. Mengubah batas negara sama dengan mengubah batas antar sektor publik, dan swasta.

b) Melanjutkan interaksi antar anggota yang disebabkan oleh kebutuhan bertukar sumber daya dan merundingkan tujuan bersama.

c) Interaksi yang berakar pada kepercayaan dan diatur dan dinegosiasikan dan disetujui oleh anggota.

d) Tingkat otonomi yang signifikan bagi sebuah negara. Masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap negara, mereka justru mengatur diri sendiri.

Tata kelola telah didefinisikan untuk merujuk pada struktur dan proses yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, supremasi hukum, stabilitas, kesetaraan dan inklusivitas, pemberdayaan, dan partisipasi berbasis luas. Tata kelola juga mewakili norma, nilai, dan aturan main yang melaluinya urusan publik dikelola secara transparan, partisipatif, inklusif, dan responsif. Oleh karena itu, tata kelola dapat bersifat halus dan mungkin tidak mudah diamati. Dalam arti luas, pemerintahan adalah tentang budaya dan lingkungan kelembagaan di mana warga negara dan pemangku kepentingan berinteraksi di antara mereka sendiri dan berpartisipasi dalam urusan publik. (Ibe.unesco.org, 2015)

Konsep "tata kelola" bukanlah hal baru. Namun, itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, oleh karena itu kita harus fokus dengan benar. Arti sebenarnya dari konsep tersebut tergantung pada tingkat pemerintahan yang

sedang kita bicarakan, tujuan yang ingin dicapai dan pendekatan yang diikuti. Konsep tersebut telah ada dalam wacana politik dan akademis untuk waktu yang lama, mengacu dalam arti umum untuk tugas menjalankan pemerintahan, atau entitas lain yang sesuai dalam hal ini. Dalam hal ini, definisi umum yang diberikan oleh Webster's Third New International Dictionary (1986:982) membantu, hanya menunjukkan bahwa pemerintahan adalah sinonim untuk pemerintah, atau "tindakan atau proses pemerintahan, khususnya pengarahan dan kontrol otoritatif". Penafsiran ini secara khusus berfokus pada efektivitas cabang eksekutif pemerintahan.

Definisi kerja yang digunakan oleh British Council, bagaimanapun, menekankan bahwa "pemerintahan" adalah gagasan yang lebih luas daripada pemerintah (dan dalam hal ini juga terkait konsep seperti negara, pemerintahan yang baik dan rezim), dan selanjutnya menyatakan: "Pemerintahan melibatkan interaksi antara lembaga-lembaga formal dan mereka yang ada dalam masyarakat sipil. Pemerintahan mengacu pada proses di mana elemen-elemen dalam masyarakat menggunakan kekuasaan, otoritas dan pengaruh serta menetapkan kebijakan dan keputusan mengenai kehidupan publik dan peningkatan sosial."

Oleh karena itu, "pemerintahan", tidak hanya mencakup tetapi melampaui makna kolektif dari konsep-konsep terkait seperti negara, pemerintah, rezim, dan pemerintahan yang baik. Banyak elemen dan prinsip yang mendasari "pemerintahan yang baik" telah menjadi bagian integral dari arti "pemerintahan". John Healey dan Mark Robinson (2015) mendefinisikan "pemerintahan yang baik" sebagai berikut: "Ini menyiratkan tingkat efektivitas organisasi yang tinggi

dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar ditempuh, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas, dan rakyat. pemerintahan yang baik juga menyiratkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Ini tidak selalu mengandaikan penilaian nilai, misalnya, penghormatan yang sehat terhadap kebebasan sipil dan politik, meskipun pemerintahan yang baik cenderung menjadi prasyarat untuk politik. legitimasi".

Kontribusi Goran Hyden (2004) untuk membawa kejelasan yang lebih besar pada konsep pemerintahan perlu mendapat perhatian khusus. Dia mengangkat pemerintahan ke "konsep payung untuk mendefinisikan pendekatan politik komparatif", sebuah pendekatan yang mengisi kesenjangan analitis yang ditinggalkan oleh orang lain. Dengan menggunakan pendekatan tata kelola, ia menekankan "potensi kreatif politik, terutama dengan kemampuan para pemimpin untuk bangkit di atas struktur biasa yang ada, untuk mengubah aturan main dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam upaya memajukan masyarakat di arah baru dan produktif".

Pandangannya bermuara pada hal berikut:

1) Tata kelola adalah pendekatan konseptual yang, jika dijabarkan sepenuhnya, dapat membingkai analisis komparatif makro-politik.
2) Tata kelola menyangkut pertanyaan "besar" yang bersifat "konstitusional" yang menetapkan aturan perilaku politik.
3) Tata kelola melibatkan intervensi kreatif oleh aktor politik untuk mengubah struktur yang menghambat ekspresi potensi manusia.

4) Pemerintahan adalah konsep rasional, menekankan sifat interaksi antara negara dan aktor sosial, dan di antara aktor sosial itu sendiri.
5) Tata kelola mengacu pada jenis hubungan tertentu di antara aktor politik: yaitu, hubungan yang disetujui secara sosial daripada sewenang-wenang.

Sebagai kesimpulan, jelas bahwa konsep *governance* selama bertahun-tahun mendapatkan momentum dan makna yang lebih luas. Selain sebagai instrumen manajemen urusan publik, atau tolok ukur perkembangan politik, pemerintahan telah menjadi mekanisme yang berguna untuk meningkatkan legitimasi ranah publik. Ini juga telah menjadi kerangka atau pendekatan analitis untuk politik komparatif.

Menurut Bevir (2013), mengatakan bahwa tata kelola berasal dari gagasan institusionalis, dimana jaringan merupakan struktur paling efektif dalam pemberian layanan dan tugas pemerintah lainnya. Tata kelola akan lebih efektif jika diletakkan pada sejumlah besar institusi yang tumpang tindih dan menggabungkan beragam aktor. Sistem tata kelola pada umumnya menganjurkan peningkatan partisipasi. Dengan begitu, juga akan meningkatkan kualitas aktivitas negara.

Pertumbuhan pendekatan tata kelola dapat dijelaskan dengan baik melalui beberapa faktor (Kooiman, 2002):

a) Tumbuhnya kesadaran bahwa pendekatan tata kelola bukanlah satu-satunya aktor penting dalam menangani masalah-masalah sosial yang besar.

b) Interaksi yang bersifat tradisional dan modern antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menangani masalah-masalah.

c) Pengaturan mekanisme pemerintahan akan berbeda untuk tingkat masyarakat dan bervariasi menurut sektor.

d) Secara bersamaan, banyak masalah tata kelola yang saling bergantung atau terkait.

Menurut Bevir (2002) memberikan gambaran bahwa tata kelola mungkin memberikan peluang yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam keterlibatan politik bagi warga negara. Akan tetapi, bentuk devolusi dan partisipasi yang ditawarkan menimbulkan masalah khusus tentang kontrol dan akuntabilitas politik. Pemberian layanan tentu harus diikuti dengan pengembangan jalur akuntabilitas politik yang sesuai.

Gagasan kegagalan tata kelola mengacu pada pengakuan bahwa pengorganisasian pemerintahan melalui jaringan yang jauh dari masalah karena beroperasi dalam konteks konflik dan ketidakpastian. Kegagalan tata kelola mungkin terjadi karena konflik kepentingan yang tidak bisa terselesaikan, kepercayaan antar agen yang kurang, pengarahan yang kurang kompeten, dan perbedaan rentang waktu antara masyarakat, serta tantangan untuk berkerja pada skala spasial yang berbeda (Chhotray and Stoker, 2009).

Tabel 1. 3 Masalah *Governance* dan Solusinya: dari Berbagai Disiplin Ilmu

Main Discipline(s) for source of insight	Perceived governance problem	Mechanism for governance solution
1. Institutional Economics and Political Science	Communication and information failures lead to fears of opportunistic behaviour.	Development of more transparent systems and institutional arrangements that ensure mutual oversight. Try to avoid crowding out of intrinsic or moral motivations.
2. Institutional Economics and Political Science	Inability to make credible commitments means that cooperation cannot be sustained.	Provide scope for power to be held by arms-length or independent institutions but do not deny role of power and politics.
3. Political Science and International Relations	Accountability mechanisms are misaligned and as a result actors lack responsibility to each other and the capacity to join up.	Clarify responsibilities and develop new accountability procedures that stress power-sharing and joint learning.
4. Political Science and International Relations	Trust and legitimacy are not present in the governance setting and as a result the effectiveness of governance arrangements is compromised.	Develop reconciliation measures and practices of representation and participation.
5. Development Studies and Political Science	Structural inequalities and ingrained power relations block path to effective governance.	Move beyond hectoring principles to engagement with the realties of politics by providing scope for the mobilisation of new political forces.
6. Development Studies and International relations	The hegemonic influence of key ideas and powers lead to forced agreement rather than shared ownership and commitment of challenges.	Provide space for the challenge to hegemonic forces and provide opportunity for a more open exchange.
7. International Relations, Political Science, Development Studies and Institutional Economics	Enforement and regulation failures mean that agreements when reached cannot be implemented.	Strengthen the state or role of regulators, but beware of undermining the voluntary and committed engagement of others in finding governance solutions.

Sumber: (Chhotray and Stoker, 2009)

Mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain (Andhika, 2017):

a) Faktor pemimpin yang menjadi penggerak perubahan

b) Organisasi pemerintah yang menjadi katalisator perubahan

c) Kebijakan yang menghambat perubahan direvisi kembali supaya memperlihatkan keperbihakan pada perubahan

Menurut World Bank, terdapat beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu (Kharisma, 2014):

a) Partisipasi masyarakat, di mana semua masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang menyeluruh tersebut ditegakkan berdasarkan kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta kepastian berpartisipasi secara konstruktif.

b) Tegaknya supermasi hukum. Dalam hal ini, hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.

c) Transparansi. Informasi harus bebas. Pemerintah, lembaga, dan informasi harus bisa diakses secara mudah oleh masyarakat.

d) Peduli *stakeholder*. Pemerintah dan prosesnya harus bisa memberikan pelayanan pada semua pihak yang berkepentingan.

e) Berorientasi pada konsensus. Tata kelola pemerintahan yang baik harus dapat menjadi jembatan bagi kepentingan yang berbeda-beda guna membangun konsensus menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk konsensus kebijakan dan prosedur.

f) Kesetaraan. Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan dalam memperbaiki dan mempertahankan apa yang menjadi sumber kesejahteraan.

g) Efektifitas dan efisiensi. Setiap hasil dari proses harus disesuaikan dengan kebutuhan dan secara optimal menggunakan sumber daya yang ada.

h) Akuntablitias. Dalam setiap pengambilan keputusan harus memiliki pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat atau lembaga yang berkepentingan.

i) Visi strategis. Pemimpin dan masyarakat diharapkan dapat memiliki perspektif yang luas dan melihat ke depan mengenai pemerintahan dan pembangunan manusia yang baik. Selain itu juga diharuskan memiliki rasa peka pada apa yang menjadi kebutuhan setiap perkembangan.

Selanjutnya, juga diharuskan paham terhadap kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi dasar perspektif.

Menurut Jessop (2011), terdapat tiga faktor utama yang membatasi keberhasilan pemerintahan dalam membangun ekonomi dan sosial lokal. *Pertama,* pengaruh pada semua bentuk koordinasi ekonomi dan sosial yang tertulis pada kapitalisme itu sendiri. Mulanya terdapat pola keseimbangan antara pasar dan negara, tetapi kemudian pemerintahan tidak memperkenalkan istilah ketiga yang bersifat netral, lalu menambahkan 'situs' lain yang membuat kesemibangan justru diperebutkan. *Kedua,* berhubungan dengan penyisipan kemitraan ke dalam sistem negara. Kendala ke dua ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 1) mekanisme tata kelola dan pemerintahan ada pada skala yang berbeda, 2) mekanisme koordinasi yang mungkin memiliki waktu yang berbeda. Salah satu fungsi pemerintahan adalah untuk memungkinkan keputusan jangka panjang yang dipisahkan dari perhitungan politik jangka pendek, 3) negara biasanya melakukan pemantauan pada pengaruhnya terhadap kapasitas untuk mengamankan kohesi sosial dalam masyarakat yang terpecah. Negara berhak membuka, menutup, dan mengartikulasikan kembali pengaturan pemerintahan tidak hanya dalam fungsi tertentu, tetapi juga dari sudut pandang partisan dan keuntungan politik secara keseluruhan.

Ketiga, kendala berakar dari sifat pemerintahan sebagai pengorganisasian diri. Hal ini dilihat dari: 1) upaya tata kelola mungkin gagal karena penyederhanaan kondisi tindakan dan/atau pengetahuan yang kurang mengenai hubungan sebab akibat yang berpengaruh terhadap objek pemerintahan, 2)

terdapat masalah koordinasi pada satu atau lebih tingkat antar pribadi, antar organisasi, dan antar sistem. Ketiga level ini sering kali disangkutpautkan dengan cara yang kompleks, sehingga negosiasi antar organisasi seringkali bergantung kepada kepercayaan antara pribadi dan kemudi antar sistem yang tidak terpusat, 3) masalah hubungan antara mereka yang terlibat komunikasi (jaringan, negosiasi, dll), serta mereka yang berkepentingan dan identitasnya diwakili Mayntz, dan Malpas dan Wickham dalam (Jessop, 2011).

Secara lebih jelasnya Malpas and Wickham (1995), memberikan penjelasan tentang tata kelola menjadi dua poin utama. *Pertama,* ketidaklengkapan atau keberpihakan dari setiap proyek tata kelola sehubungan dengan objek dan praktik yang diaturnya. *Kedua,* karakter yang tidak lengkap dari setiap pemerintahan itu sendiri selama ia masih tunduk dan berimplikasi dengan sistem pemerintahan lainnya. Kedua dianggap menunjukkan kecenderungan tata kelola untuk gagal sejauh proyek-proyeknya selalu tunduk pada campur tangan dan praktik pemerintahan lainnya, serta terjadi perlawanan dalam praktik tersebut. Perlawanan dan campur tangan semacam itu bukan merupakan sebuah kebetulan bagi pemerintahan, tetapi merupakan unsur intrinsik yang berada di dalam sistem. Oleh karena itu, kapasitas dalam memerintah selalu bersifat parsial baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap apa yang diperintahnya.

7) Kapasitas Adaptif dari Empat Jenis *Governance*

Berbicara tentang *governance* tidak akan luput dari kapasitas adaptif yang berhubungan dengan empat jenis tata kelola pemerintah. Menurut (Pierre and Peters, 2005), hubungan antara eksploitasi dan eksplorasi dapat dilihat melalui

penempatannya dalam ruang konseptual. *Pertama,* pemerintahan yang menggabungkan antara eksploitasi tingkat tinggi dengan eksplorasi rendah dapat dilihat sebagai tugas pemerintahan dalam kondisi yang mapan. Menurutnya, ini adalah bentuk pemerintahan paling efisien karena mencoba memaksimalkan kapasitas untuk eksploitasi melalui serangkaian mekanisme sosial yang padat dengan memperhatikan stabilitas dan prediktabilitas guna menjaga biaya transaksi tetap rendah. Bentuk tata kelola ini merupakan tata kelola yang kaku (*rigid),* karena memaksimalkan stabilitas, tetapi tidak fleksibel dalam menghadapi situasi perubahan. Peters dan Pierre meyakini bahwa jenis ini memiliki karakteristik dengan koordinasi dan kerja sama yang tinggi, tetapi respon pada perubahan eksternal lambat karena *feed back* yang diberikan bersifat lemah.

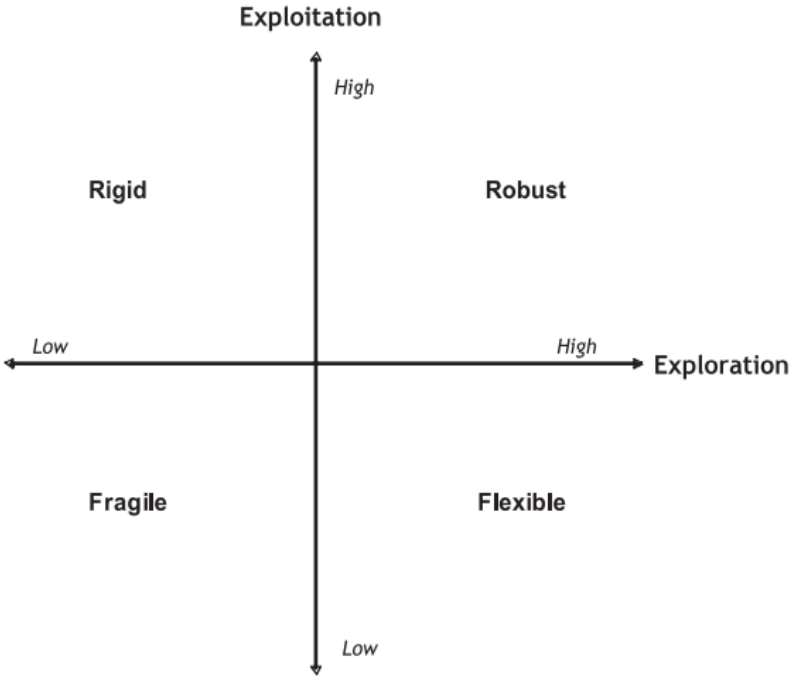

Gambar 1.4 Kapasitas Adaptif dari Empat Jenis Tata Kelola
Sumber: Duit and Galaz (2008)

Kedua, menurut King dan La Porte dalam Duit and Galaz (2008), jenis *governance* atau tata kelola yang kuat (*robust)* merupakan penggabungan dari eksplorasi yang tinggi dengan kapasitas eksploitasi yang juga tinggi. Jenis ini cocok untuk menangani tata kelola dengan kondisi mapan, proses transformasi jangka panjang, dan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Tentu saja kondisi tersebut adalah keadaan yang ideal karena efek institusi yang menyebabkan kekakuan dijaga agar tidak menghambat proses eksplorasi yang dibutuhkan. Jenis tata kelola yang kuat (*robust)* merupakan jenis yang memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dan dapat memberikan respons pada segala masalah yang bersifat kompleks.

Ketiga, menurut Duit and Galaz (2008), jenis *governance* yang rapuh (*fragile*) memperlihatkan eskploitasi dan eksplorasi yang lemah, di mana tata kelola mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pengetahuan dan modal karena tingginya biaya transaksi, sehingga menghambat kemampuan adaptasi pada situasi baru. Pemerintahan sulit untuk menyangga dampak guncangan, dan berujung pada sulitnya mencapai tindakan kolektif.

Keempat, jenis tata kelola yang fleksibel menurut Bode dalam Duit and Galaz (2008), memperlihatkan situasi di mana sistem *governance* atau tata kelola memiliki eksplorasi yang berkembang dengan baik, tetapi kurang dalam hal mengubah manfaat dari ekslorasi menjadi objek eksploitasi. Adaptasi dilangsungkan bertahap, serampangan, dan tanpa adanya landasan kelembagaan, tetapi cukup untuk adaptasi dalam jangka panjang, dengan mengorbankan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Eksplorasi tidak terarah, tidak hierarkis, dan

dilakukan secara mandiri oleh banyak aktor yang berusaha memaksimalkan manfaat individu melalui penyesuaian bersama yang tidak terkoordinir dan kemunculan ‘lekuk’ eksplorasi.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode menjadi hal yang paling penting. Metode menjadi jembatan utama penelitian setelah permasalahan dan teori dirangkai. Melalui metode akan diketahui bagaimana cara mendapatkan data dan hasil penelitian yang kemudian dirangkai menjadi tulisan. Menurut (Siyoto and Sodik, 2015), penelitian adalah sebuah pelacakan terorganisasi, yang bersifat penuh kehati-hatian dan kritis dalam pencarian fakta dalam menentukan sesuatu.

Penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah yang dipergunakan untuk mendapatkan data bagi tujuan dan keguanaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud berdasarkan ciri keilmuan yakni rasional, empiris, dan sistematis. Rasional diartikan sebagai cara yang masuk akal dan terjangkau oleh nalar manusia. Empiris memiliki pengertian sebagai cara yang dapat diamati oleh indera manusia, agar orang lain dapat mengamati dan tahu cara yang dipergunakan. Selanjutnya, sistematis berarti proses yang dipergunakan dalam *research* dilakukan melalui langka tertentu yang sifatnya logis (Suyitno, 2018).

Melalui pengertian tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah yang jelas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama, yaitu: 1) jenis penelitian, 2) objek penelitian, 3) sumber data, 4) teknik pengumpulan data, 5) teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka. Melfianora (2019), mengatakan bahwa studi pustaka merupakan istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka *(literature review),* dan tinjauan teoritis. Data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dari sumber pustaka atau dokumen. Sari and Asmendri (2020), mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan *research* yang dilakukan melalui pengumpulan informasi dan data, dengan data-data perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian terdahulu, artikel, catatan, jurnal dan lain-lain. keseluruhan data tersebut harus relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memfokuskan diri untuk melihat perkembangan *e-government* di Indonesia melalui perspektif *governance,* melalui data-data kepustakaan. Kuhlthau (1994), mengatakan bahwa prosedur dalam penelitian kepustakaan terdiri dari:

a) pemilihan tema
b) eksplorasi informasi
c) penentuan arah penelitian
d) pengumpulan sumber data, dan
e) penyusunan laporan

Apabila digambarkan, maka alur prosedur dari studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

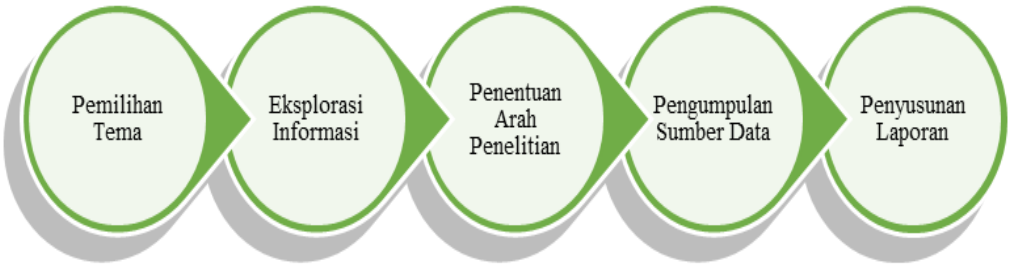

Gambar 1.5 Prosedur Studi Kepustakaan

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perkembangan *e-government* di Indonesia. Melalui penelitian ini objek penelitian tersebut akan dikaji lebih mendalam, dengan memperdalam perkembangan *e-government* dilihat dari kaca mata *governance*, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengikuti arus *e-government*, dan masa depan *e-government* di Indonesia. Objek penelitian ini diharapkan dapat menunjukan bagaimana perkembangan *e-government* di Indonesia jika ditinjau dari perspektif *governance.*

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Herlina (2020), sumber sekunder ialah jika sumber atau penulis sumber tidak mendengar peristiwa secara langsung. Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku, artikel jurnal, berita, dokumen dan sumber sekunder lainnya. Keseluruhan sumber tersebut dipilih dan dilihat secara seksama untuk menjaga kesesuaiannya dengan penelitian, yaitu tentang perkembangan *e-government* di Indonesia dan perspektif *governance* yang melatarbelakanginya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi menuntut penulis untuk melakukan pengumpulan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian tentang perkembangan *e-government* dan perspektif *governance* yang digunakan. Data-data relevan yang telah didapatkan, harus diolah dan dikaji kembali oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis.* Menurut Sofiah et al., (2020), *content analysis* adalah sebuah pembahasan atau pengkajian yang sifatnya mendalam terhadap suatu isi dari informasi yang tercetak ataupun tidak tercetak. Sementara itu, Fraenkel dan Wallen dalam (Sari and Asmendri, 2020) mengatakan bahwa analisis isi merupakan alat penelitian yang fokus kepada konten aktual dan fitur internal media yang dimanfaatkan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung dengan analisis terhadap komunikasi mereka, misalnya buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, algu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dikaji.

Tujuan dari *content analysis* bertujuan untuk menjaga kekekalan proses sebuah kajian dan menghindari dan mengatasi salah informasi, sehingga dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka tersebut. (Ramanda et al., 2019). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggali sumber pustaka tentang perkembangan *e-government* dan perspektif *governance*

dalam perkembangan *e-government* di Indonesia, dengan sangat hati-hati. Peneliti memilah data yang relevan, kemudian dianalisis dan dilakukan pengecekan.

BAB II

SEJARAH PANJANG *E-GOVERNMENT DAN GOVERNANCE*

A. Pengantar

Pentingnya pemahaman tentang *e-government*, maka peneliti memulai menjelaskan arti dari elektronik itu sendiri. Elektronik merupakan suatu alat yang diciptakan atas dasar prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut (Pusat Bahasa, 2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut beberapa definisi yang kaitannya dengan elektronik, sebagai berikut: Informasi Elektronik, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya, untuk memahami tentang perkembangan e-government maka peneliti menyampaikan terlebih dahulu pada bab II tentang *sejarah e-government* dan *governance* yang secara terstruktur dimulai dari sejarah *e-government* dunia, sejarah *governance*, kemudian dijelaskan sejarah *e-government* di Indonesia. sehingga dapat terstruktur dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian.

B. Sejarah *E-Government* Dunia

E-government (kependekan dari *electronic government*) yang merupakan penggunaan perangkat komunikasi teknologi, seperti komputer dan internet, untuk menyediakan layanan publik kepada warga negara dan orang lain di suatu negara atau wilayah. *E-government* menawarkan peluang baru untuk akses warga yang lebih langsung dan nyaman ke pemerintah, dan untuk penyediaan layanan pemerintah secara langsung kepada warga (Caves, 2004). Proses pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi dengan memunculkan konsep *e-government* ini diterapkan pada pertengahan tahun 1990-an, *e-government* diciptakan untuk mempercepat dan meredakan masalah pada bidang pemerintahan melalui penggunaan teknologi internet. Pada tahun-tahun ini, pemerintah banyak berorientasi melalui inovasi berbasis *e-government* dan fokus pada penggunaan internet guna memaksimalkan akses pada informasi dan layanan pemerintah (Indrayani, 2016). Menurut (Fang, 2002), implikasi *e-government* dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh pelayanan pemerintah melalui penggunaan sarana elektronik *modern*, yang memungkinkan mengakses informasi pemerintah, dan guna menyelesaikan transaksi pemerintah atas penawaran yang berpotensi membentuk sektor publik dan membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Perkembangan konsep *e-government* dipicu oleh tiga hal utama. Menurut (Indrajit, 2006), ketiga hal tersebut antara lain:

1. Kemunculan globalisasi yang terjadi secara cepat dan mmebawa isu yang berhubungan dengan demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM),

law, transparency, korupsi, *civil society, good corporate governance, free trade, free market,* dan hal lain yang menjadi perhatian utama sebuah bangsa untuk bisa berbaur dengan perubahan. Oleh karenanya, jika di masa lalu kekuasaan sebuah negara bersifat terpusat pada pemerintahan, atau dalam istilahnya *supply side,* maka kemunculan globalisasi menuntut sebuah pergeseran ke arah masyarakat atau *demand side.* Hal tersebutlah yang kemudian yang menyebabkan tingginya tuntutan dari masyarakat kepada kinerja pemerintah.

2. Akselerasi teknologi informasi yang menyebabkan data, informasi dan pengetahuan tercipta dengan sangat cepat. Penyebarannya pun terjadi dengan mudah pada lapisan masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintah di era modern mengambil sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi lebih mudah 'mengambil alih' fungsi pemerintahan melalui penggunaan teknologi.
3. Adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berhubungan dengan perbaikan kinerja pada industri swasta dalam hal kegiatan ekonomi. Namun, percepatan ini tidak diiringi percepatan pada bidang publik. Dari sini, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan pelayanan. Sehingga, tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja semakin tinggi. Selain itu, ketika terjadi permasalahan, maka masyarakat tidak ragu untuk melakukan evaluasi.

Perkembangan *e-government* melalui The Division of a Public Administration and Development Management (DPAPM) dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) melakukan survei *e-government* dua tahunan yang mencakup bagian berjudul *e-Government Development Index* (EGDI). Ini adalah peringkat komparatif dari 193 negara di dunia menurut tiga indikator utama: i) OSI - Indeks Layanan Online yang mengukur kehadiran online pemerintah dalam hal pemberian layanan; ii) TII - Indeks Infrastruktur Telekomunikasi iii) HCI - Indeks Modal Manusia. Membangun model untuk pengukuran layanan digital, Survei menilai 193 negara anggota PBB menurut indeks komposit kuantitatif kesiapan e-government berdasarkan penilaian situs web; infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia

Negara-negara Asia menunjukan perkembangan *e-government* sudah lebih maju dibanding Indonesia. Negara Malaysia dengan sistem kependudukan diwujudkan dengan MyKad yang merupakan *government multi purpose card*. Kartu tersebut ditandatangani langsung oleh lima agensi pemerintahan Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengankutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Kesehatan, dan Jabatan Keimigrasian (Ali, 2020).

Di Korea, *e-government* muncul pertama kali dalam laporan kebijakan pemerintah tahun 1996. Setahun sebelumnya, Pemerintah Korea terlebih dahulu mendirikan ICT Promosi Act guna akselerasi informasi masyarakat. Pada tahun 2016 diusulkan sepuluh tugas utama. Yang paling utama adalah proyek *e-*

government yang menempatkan orang sebagai pelanggan. *E-government* efektid mereformasi organisasi pemerintah dan layanan disampaikan melaluui teknologi informasi. Keberadaan *e-government* mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mengembangkan *interface* dalam penyampaian informasi kapan saja dan di mana saja (Indrayani, 2016).

Di Cina, *e-government* dikembangkan pada awal tahun 2004 dengan dicangkokannya TIK ke dalam struktur administrasi. Kendala terbesar dalam mengembangkan *e-government* di cina adalah berasal dari pejabat di lembaga negara bagian, provinsi, dan lokal. Tidak banyak pejabat yang ingin memperkenalkan perubahan mendasar terhadap pola aktivitas administrasi dan kontrol politik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Di Cina, pemerintah pusat memiliki kesadaran bahwa adanya biaya ekonomi dari ketidakefisienan tata kelola. Pemerintah seringkali dapat menjadi masalah yang menghalangi kemajuan. Dengan demikian, upaya untuk mendorong perubahan melalui lembaga di suatu tingkat struktur tata kelola yang sangat kompleks, harus dilakukan (Holliday and Yep, 2005).

Di Singapura, *e-government* berkembang pesat sejak tahun 2000, dan kemudian memasuki tahap infus di tahun selanjutnya. Masalah yang dialami Singapura pada tahap ini adalah kebutuhan untuk mengubah pola pikir pegawai negeri, ambiguitas tujuan *e-government* terhadap lembaga, kurangnya kemampuan teknis dan sumber daya keuangan, dan masalah kesenjangan digital. Masalah-masalah tersebut dapat ditangani oleh Singapura dan erat kaitannya dengan kepemimpinan yang kuat, dengan rencana aksi strategis, memberikan dukungan

yang kuat, pengambilan pendekatan terpusat dalam hal pendanaan dan infrastruktur, serta melakukan upaya-upaya preventif dalam menjembatani kesenjangan (Ke and Wei, 2004). Ke dan Wei juga menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2001 Singapura berhasil menempatkan 92% dari semua layanan publik yang disampaikan melalui daring. Pelajaran yang dapat diambil dari Singapura adalah dalam hal mengoordinasikan lembaga dan melakukan dorongan terhadap *e-government*, tetapi hal ini mungkin tidak dapat diterapkan di negara yang memiliki budaya individualisme yang tinggi. Selain itu, masalah kesenjangan digital dapat menjadi lebih pelik di negara dengan populasi besar dan infrastruktur TI yang belum berkembang.

Menurut United Nation, *Department of Economic and Social Affairs*, negara di Uni Eropa telah menjadikan *e-government* sebagai administrasi utama dan prioritas politik sejak tahun 1990-an. Sementara itu Amerika Utara telah memimpin dalam hal *e-government*, sementara Eropa berada di peringkat kedua dalam laporan PBB. Hal ini dilihat pada tahun 2004. Secara khusus anggota Uni Eropa menerima peringkat tinggi dalam indeks kesiapan *e-government* di antara semua negara anggota PBB: Denmark (2), Inggris (3), Swedia (4), Finlandia (9), Belanda (11), Jerman (12), Belgia (16), Austria (17), Irlandia (19), Perancis (24), Luxemburg (25), Italia (26), Portugal (31), Spanyol (34), dan Yunani (36) (Lee et al., 2005).

Di Britania Inggris, pemerintah Inggris telah menempatkan *e-government* melalui peningkatan agenda kebijakan dari sebelumnya, dengan pembaruan dorongan organisasi dari pusat dan masuknya sumber daya secara besar-besaran

ke dalam departemen dan lembaga. Namun, pada tingkat departemen, hambatan untuk kemajuan *e-government* tetap ada, terutama masalah keahlian teknologi informasi dan keengganan publik dan pejabat untuk merangkul cara kerja berbasis internet. Di mata beberapa kritikus, *e-government* dianggap telah mengambil alih reformasi administrasi sebelumnya menjadi sebuah 'paradigma' baru, dengan implikasi besar bagi administrasi pemerintahan (Margetts, 2006).

Menurut Musraca dalam (B Irawan, 2017), manfaat *e-government* yang dirasakan oleh negara-negara di dunia dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi. Manfaat *e-government* adalah untuk mengurangi biaya transaksi guna perbaikan kapasitas dengan target pelayanan, meningkatkan cakupan dan kualitas penyampaian layanan, peningkatan kapasitas respon menghadapi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
2. Dimensi sosial. Kebermanfaatan *e-government* dalam dimensi sosial sangat beragam. Dimulai dari ketersediaan lapangan kerja, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, target pelayanan pemerintah yang lebih baik, dan kapasitas penyediaan keselamatan dan keamanan yang meningkat.
3. Dimensi pemerintahan. Keberadaan *e-government* dapat meningkatkan ketercapaian *good governance* dalam hal keterbukaan, transparasi, akuntabilitas, jika dibandingkan dengan pemerintahan yang bersifat konvensional. Selain itu, keberadaannya mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan menguatkan sistem demokrasi.

Pelaksanaan *e-government* di dunia mendapat banyak kritikan pada penerapannya di negara berkembang. Heeks dalam (Habibie, 2019) menyebutkan bahwa kegagalan aplikasi *e-government* di negara berkembang terjadi karena ketidakpahaman mengenai 'keadaan sekarang' dan 'apa yang ingin dicapai melalui *e-government*'. Menurut Chibora dalam (Habibie, 2019) juga menjelaskan bahwa penggunaan *e-government* di negara berkembang sulit dilakukan karena karakteristik administrasi lokal, konteks sosial-ekonomi dan infrastruktur teknologi, dan adanya kecurigaan tentang marketisasi negara yang mungkin ditanam dalam *e-government.*

Akan tetapi, Menurut (Basu, 2004), *e-government* bagi negara berkembang sebetulnya memberikan harapan dan memperlihatkan peluang. Posisi negara-negara berkembang berhubungan dengan tahap-tahap evolusi. Sebelum memasuki pembahasan implikasi hukum, pelacakan infrastruktur negara-negara berkembang perlu dilakukan. Dalam konteks negara berkembang, TIK merupakan kekuatan paling signifikan dari modernisasi. Investasi yang dilakukan dalam pengembangan infrastruktur komunikasi, dan pelatihan serta pembelajaran, dianggap akan memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan daya saing sebagai penyedia layanan eksternal.

Isu-isu penting kebijakan informasi yang mungkin dapat mempengaruhi perkembangan *e-government* meliputi (Jaeger and Thompson, 2003):

1. Ketersediaan listrik, telekomunikasi, dan internet yang konsisten dan mempermudah akses.
2. Masalah bahasa dan komunikasi yang harus diatasi.

3. Mencegah *e-governmen* mengurangi responsivitas pejabat pemerintah.
4. Mencegah *e-government* mengurangi tanggung jawab pejabat pemerintah.
5. Keterlibatan individu penyandang disabilitas dalam *e-government.*

C. Sejarah *Governance*

Perspektif sejarah konsep *governance* bukanlah istilah baru, istilah ini dipergunakan untuk pertama kali di Perancis pada abad ke semasa ke Raja Henry berkuasa IV pada tahun di 1399. Dalam masa ini *governance* dipahami sebagai "pemerintah pusat" (Löffler, 2003). Istilah ini *governance* menjadi lebih populer ketika Bank Dunia kembali memperkenalkan istilah *'governance"* dalam Laporan Bank Dunia dalam tahun 1989. Penggunaan istilah *governance* oleh Bank Dunia mengisyaratkan pendekatan baru untuk pembangunan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan demokrasi. Pada saat yang sama, penggunaan istilah governance dalam rangka mencegah kritik terhadap Bank Dunia berkaitan dengan keikut sertaan atau campur tangan Bank Dunia dalam keputusan politik yang dibuat oleh negara-negara pengutang.

Sejalan dengan hal tersebut konteks pembangunan menurut (Nanda, 2006) konsep *good governance* berkaitan dengan persyaratan yang diminta kepada negara-negara yang akan menerima bantuan (aid program) terutama beberapa negara Sub Sahara Afrika yang pada tahun 1980 mengalami kebangkrutan, negara-negara tersebut memperoleh tawaran dari Internasional Financial

Instirution (IFIs) seperti IMF dan World Bank serta juga beberapa negara yang maju untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Tuntutan lembaga pendanaan internasional dan negara-negara pemberi pinjaman kepada negara pengutang adalah melaksanakan apa yang disebut dengan good governance, konsep ini dengan mengadopsi kebijakan ekonomi pasar sebagi salah prasyarat untuk mendapatkan bantuan. (Santiso, 2001) mengemukakan bahwa pengenalan konsep *governance* dalam agenda pembangunan mencerminkan tumbuh kekhawatiran terhadap efektivitas bantuan yang bertujuan utama adalah untuk mengurangi kemiskinan dan penderitaan manusia. Hal dihadapkan dengan anggaran bantuan yang menurun dan peningkatan pengawasan oleh masyarakat sipil, Bank Dunia telah memberikan pertimbangan yang lebih besar terhadap efek meresap dari salah urus dan korupsi endemik.

Menurut (Chhotray and Stoker, 2009) menjelaskan bahwa selama tiga dekade terakhir terdapat dua perkembangan yang telah memicu gelombang terhadap minat kepada kajian mengenai *governance*. Pertama adalah perkembangan dan derajat globalisasi. Kedua adalah penyebaran institusi dasar dari demokrasi dan apa yang disebutnya sebagai kemenangan demokratis yang ideal. Perubahan ini secara signifikan dan menyebabkan pendefinisian ulang dari sejarah manusia. *Governance* walaupun merupakan tema yang ditemui oleh cendekiawan sebelumnya, namun dalam konteks kekinian arus baru *governance* didefinisikan oleh perubahan sosial dan ekonomi yang besar.

Konsep *Governance* menurut (Chhotray and Stoker, 2009) dibangun oleh empat elemen, yaitu: pertama, adalah aturan; kedua, adalah konsep kolektif; ketiga, adalah pengambilan keputusan dan keempat adalah ide bahwa tidak ada sistem kontrol formal dalam governance yang dapat mendikte "hubungan dan hasil".

D. *Sejarah E-government* di Indonesia

Sejak tahun 2003, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait *e-government,* yaitu: Inpres Nomor 3 Tahun 2-003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government,* dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Inofrmasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga. Dalam pelaksanaannya, Inpres tersebut merupakan sebuah regulasi mengenai strategi pengembangan *e-government* yang dilengkapi dengan berbagai panduan tentang *e-government,* panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, panduan manajemen sistem dokumen elektronik pemerintah, panduan rencana induk pengembangan *e-government* lembaga, panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, dan panduan tentang pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia *e-government.* Kedua kebijakan di atas menjadi acuan bagi seluruh lembaga pemerintah di Indonesia dalam pelaksanaan penerapan *e-government* (Prihanto, 2016).

Menurut (Sari and Winarno, 2012), tantangan dalam realisasi pengembangan *e-government* di Indonesia berhubungan dengan geografi, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, *e-government* memiliki proses yang lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang

harus dikeluarkan negara. Selain itu, data produk pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan karena adanya kesenjangan antar daerah dan duplikasi database. Hal ini serupa dengan pendapat (Silalahi et al., 2015) yang menyebutkan bahwa penerapan *e-government* dianggap belum optimal dan masih jauh dari cita-cita, di mana terlihat tingginya tingkat kegagalan implementasi dan hasil pemeringkatan yang rendah apabila dilihat dari hasil penelitian dan survei yang telah dilakukannya. Silalahi dkk juga menyebutkan bawha hambatan dan tantangan penerapan *e-government* di Indonesia berhubungan dengan masalah standarisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi masyarakat, kepemimpinan dan budaya organisasi. Menyangkut masalah tantangan, (Wirawan, 2020) menyebutkan bahwa tantangan penerapan dan realisasi *e-government* terjadi semenjak pertumbuhan era industri 4.0. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah karena keterbatasan regulasi sebagai payung hukum. Regulasi yang menjelaskan perincian tentang mekanisme penerapan *e-government* belum ada. Sedangkan, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tidak dapat dibendung, dianggap tidak seimbang.

Hambatan penggunaan *e-government* dilihat dari kondisi di mana mayoritas situs pemerintah pusat dan daerah hanya berada pada tingkat persiapan. Hal ini menurut (Jaya, 2013) dilihat dari beberapa aspek, yang terdiri dari:

1. *E-leadership* Prioritas dan inisiatif negara dalam memperhitungkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur jaringan informasi, kondisi infrastruktur telekomunikasi, akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

3. Pengelolaan kualitas informasi dan keamanan pengelolaan informasi.
4. Lingkungan bisnis, kondisi pasar, sistem perdagangan, dan pengaturan yang menyusun konteks perkembangan bisnis teknologi informasi.
5. Masyarakat dan sumber daya manusia, difusi teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, serta sampai mana teknologi informasi disampaikan kepada masyarakat dengan dilaksanakan proses pendidikan.

Jaya (2013) juga menyampaikan mengenai beberapa kelemahan pembentukan *e-government* di Indonesia, antara lain:

1. Pelayanan melalui situs pemerintah belum didukung oleh efektifitas sistem manajemen dan proses kerja. Hal ini dikarenakan oleh kesiapan peraturan, tata cara dan keterbatasan SDM yang menjadi penghalang penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan.
2. Strategi yang belum mapan dan anggaran untuk pengembangan *e-government* tidak mencukupi.
3. Tidak ada perhatian terhadap faktor standarisasi, keamanan informasi, otentifikasi dan bermacam-macam aplikasi dasar yang memberikan kemungkinan interoperabilitas antara situs yang andal, aman dan dapat terpercaya. Dengan kata lain intansi berupaya secara sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

ACLC KPK. (2019). ModulGoodGovernance.https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul- good-governance-aclc-kpk.pdf

Akbar, M.M., Winarno, W.W., Haryono, K., 2021. Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government Pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner. J. MEDIA Inform. BUDIDARMA 5, 99–107. https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2606

Ali, E., 2020. Strategi Mengembangkan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah.

Aminudin, N., Putra, D.A., 2017. Langkah–Langkah Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Pringsewu. J. TAM Technol. Accept. Model 3, 59–66.

Andhika, L.R., 2017. Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. J. Ekon. Kebijak. Publik 8, 87–102. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867

Andi, F.R., 2021. Literature Study of Electronic Government Implementation in the Perspective of Indonesia's Electronic Government Ranking Dimensions. J. Bina Praja J. Home Aff. Gov. 13, 281–292. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.281-292

APJII, A., 2015. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Retrieved Novemb. 21, 2016.

Aprianty, D., 2016. Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. J. Ilmu Pemerintah.

Aprilia, S.N., Wijaya, A.F., Suryadi, S., 2014. Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). WACANA J. Sos. Dan Hum. 17, 126–135.

aptika.kominfo.go.id, 2018. Rencana Implementasi Roadmap E-Government. Ditjen Aptika. URL https://aptika.kominfo.go.id/0502_rencana-implementasi-roadmap-e-government-01/ (accessed 1.18.22).

Aritonang, D., 2017. The impact of e-government system on public service quality in Indonesia. Eur. Sci. J.

Aulianto, D., Yusup, P., Setianti, Y., 2019. Pemanfaatan Aplikasi "Publish Or Perish" Sebagai Alat Analisis Sitasi Pada Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran. pp. 873–880.

Basu, S., 2004. E-government and developing countries: an overview. Int. Rev. Law Comput. Technol. 18, 109–132. https://doi.org/10.1080/13600860410001674779

Bevir, M., 2013. A Theory of Governance.
Bevir, M., 2002. A Decentered Theory of Governance. J. ⍰conomistes ⍰tudes Hum. 12. https://doi.org/10.2202/1145-6396.1073
Bwalya, K.J., Mutula, S., 2016. A conceptual framework for e-government development in resource-constrained countries: The case of Zambia. Inf. Dev. 32, 1183–1198.
Cahyadi, A., 2003. E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. The Winners 4, 1–12. https://doi.org/10.21512/tw.v4i1.3796
Caves, R.W., 2004. Encyclopedia of the City. Routledge.
Chhotray, V., Stoker, G., 2009. Governance: From Theory to Practice, in: Chhotray, V., Stoker, G. (Eds.), Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach. Palgrave Macmillan UK, London, pp. 214–247. https://doi.org/10.1057/9780230583344_10
Duit, A., Galaz, V., 2008. Governance and Complexity—Emerging Issues for Governance Theory. Governance 21, 311–335. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00402.x
Dwiningrum, S.I.A., 2011. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pustaka Pelajar.
Fang, Z., 2002. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development 10, 23.
gamatechno, 2017. Strategi Penerapan e-Government di Pemerintahan [WWW Document]. Blog Gamatechno. URL https://blog.gamatechno.com/strategi-penerapan-e-government/ (accessed 1.15.22).
Habibie, D.K., 2019. Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik. J. Kebijak. Publik 10, 1–8.
Hasibuan, Zainal A, 2007. Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan e-government untuk Pemda. J. Sist. Inf. MTI UI 3, 6–70.
Hasibuan, Zainal A., 2007. Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan e-government untuk Pemda. J. Sist. Inf. MTI UI 3, 6–70.
hendysalim, 2014. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-government di Indonesia | Topik topik Lanjutan Sistem Informasi. URL http://sisteminformasi.blog.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/ (accessed 7.17.21).
Herlina, N., 2020. Metode Sejarah. Satya Historika, Bandung.
Holliday, I., Yep, R., 2005. E-government in China. Public Adm. Dev. 25, 239–249. https://doi.org/10.1002/pad.361
ibe.unesco.org, 2015. Concept of Governance [WWW Document]. Int. Bur. Educ. URL http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance (accessed 2.8.22).

Indrajit, R.E., 2006. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi.

Indrayani, E., 2016. E-government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia. IPDN.

Irawan, Bambang, 2017. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik. J. Paradig. JP 2, 174–201. https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.351

Irawan, B, 2017. E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. J. Paradig. JP.

Jaeger, P.T., Thompson, K.M., 2003. E-government around the world: lessons, challenges, and future directions. Gov. Inf. Q. 20, 389–394. https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001

Jan van Eck, N., Waltman, L., 2013. VOSviewer Manual. Univeristeit Leiden 1, 1–53.

Jaya, S., 2013. Implementasi Dan Perkembangan E-Government di Indonesia. J. Inform. Multimed. JIM 2, 37–52.

Jayanti, N.K.D.A., 2018. Kajian Analisa: Penerapan dan Pengembangan e-Government pada Pemerintah Propinsi Bali. Creat. Inf. Technol. J. 4, 141–150. https://doi.org/10.24076/citec.2017v4i2.105

Jessop, B., 2011. The Dynamics of Partnership and Governance Failure.

Kaligis, M.F., Tulusan, F., Ruru, J., 2021. Partisipasi Masyarakat Pada Era New Normal Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Ii Kota Manado. J. Adm. PUBLIK 7.

Kamoun, F., Basel Almourad, M., 2014. Accessibility as an integral factor in e-government web site evaluation: The case of Dubai e-government. Inf. Technol. People 27, 208–228.

Ke, W., Wei, K.K., 2004. Successful e-government in Singapore. Commun. ACM 47, 95–99. https://doi.org/10.1145/990680.990687

Kharisma, B., 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan) 22.

KOMINFO, P., 2016. Pengembangan *e-Government* Harus Selaras Dengan Regulasi [WWW Document]. Website Resmi Kementeri. Komun. Dan Inform. RI. URL http:///content/detail/7016/pengembangan-ie-governmenti-harus-selaras-dengan-regulasi/0/berita_satker (accessed 6.18.21).

kominfo.kotabogor.go.id, kominfo. kotabogor. go. id, 2014. Tahapan E-Government. Tahapan E-Gov. URL https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/27

Kooiman, J., 2002. Governance. A Social-Political Perspective, in: Grote, J.R., Gbikpi, B. (Eds.), Participatory Governance: Political and Societal Implications. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, pp. 71–96. https://doi.org/10.1007/978-3-663-11003-3_4

Kooiman, J., Bavinck, M., 2005. The governance perspective. Fish Life Interact. Gov. Fish. 3, 11.

Kuhlthau, C.C., 1994. Teaching the Library Research Process. Rowman & Littlefield.

Kumurur, V.A., Rosyani, Ratnangingsih, M., 2008. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. EKOTON Vol. 8, No.2, 21.

Kurniawan, T., 2006. Sistem informasi dalam berbagai perspektif: sistem informasi dari sudut pandang manusia dan sistem informasi, teknologi dan sistem informasi, organisasi dan sistem informasi, serta pendidikan dan sistem informasi: berbagai makalah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi 2006, Cet. 1. ed. Presented at the Konferensi Nasional Sistem Informasi, Informatika, Bandung.

Layne, K., Lee, J., 2001. Developing fully functional E-government: A four stage model. Gov. Inf. Q. 18, 122–136.

Lee, S.M., Tan, X., Trimi, S., 2005. Current practices of leading e-government countries. Commun. ACM 48, 99–104. https://doi.org/10.1145/1089107.1089112

Löffler, E., 2003. Governance and government: Networking with external stakeholders. Public Manag. Gov. 163–174.

Malpas, J., Wickham, G., 1995. Governance and failure: on the limits of sociology. Aust. N. Z. J. Sociol. 31, 37–50. https://doi.org/10.1177/144078339503100304

Margetts, H., 2006. E-Government in Britain—A Decade On. Parliam. Aff. 59, 250–265. https://doi.org/10.1093/pa/gsl003

Maria, E., Halim, A., 2021. E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. Ekuitas J. Ekon. Dan Keuang. 5, 40–58.

Melfianora, I., 2019. Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur 29.

Musfikar, R., 2018. Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. Cyberspace J. Pendidik. Teknol. Inf. 2, 48–58. https://doi.org/10.22373/cs.v2i1.2746

Nanda, V.P., 2006. The “good governance” concept revisited. Ann. Am. Acad. Pol. Soc. Sci. 603, 269–283.

Napitupulu, D., 2015. Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. SISFO 5.

Napitupulu, D., Adiyarta, K., Albar, 2019. Public Participation Readiness Toward E-Gov 2.0: Lessons from Two Countries, in: Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV2019. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 240–243. https://doi.org/10.1145/3326365.3326397

Novita, D., 2014. Faktor-faktor penghambat pengembangan e-Government: studi kasus pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. J. Eksplora Inform. 4, 43–52.

Nulhusna, R., Sandhyaduhita, P., ..., 2017. The relation of e-government quality on public trust and its impact on public participation. … People Process …. https://doi.org/10.1108/TG-01-2017-0004

Organ, J., 2003. The Coordination of e-Government in Historical Context. Public Policy Adm. 18, 21–36. https://doi.org/10.1177/095207670301800203

Pierre, J., Peters, B., 2005. Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios. Springer.

Porumbescu, G.A., 2016. Linking public sector social media and e-government website use to trust in government. Gov. Inf. Q. 33, 291–304.

Prihanto, I.G., 2016. Indonesia Masih Ketinggalan Dalam Pengembangan E-Government. Ber. Dirgant. 17.

publicadministration.un.org, 2020. EGOVKB | United Nations > Data > Country Information [WWW Document]. URL https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia (accessed 1.16.22).

Putra, D.A., Jasmi, K.A., Basiron, B., Huda, M., Maseleno, A., Shankar, K., Aminudin, N., 2018. Tactical steps for e-government development. Int. J. Pure Appl. Math. 119, 2251–2258.

Ramanda, R., Akbar, Z., Wirasti, R.A.M.K., 2019. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. J. Edukasi J. Bimbing. Konseling 5, 121–135. https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5019

Retnowati, N., Retnowati, D., 2015. Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. Semin. Nas. Inform. ….

Rhodes, R.A.W., 2007. Understanding Governance: Ten Years On. Organ. Stud. 28, 1243–1264. https://doi.org/10.1177/0170840607076586

Sabani, A., 2020. Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. J. Sci. Technol. Policy Manag. 12, 236–255. https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046

Sabani, A., Deng, H., Thai, V., 2019. Evaluating the Development of E-Government in Indonesia, in: Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering and Information Management,

ICSIM 2019. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 254–258. https://doi.org/10.1145/3305160.3305191

Samuel, C.A., 2021. Capaian, Peluang, dan Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia.

Santiso, C., 2001. International co-operation for democracy and good governance: moving towards a second generation? Eur. J. Dev. Res. 13, 154–180.

Sari, K., Winarno, W., 2012. Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governancedi Indonesia. J. Ekon. Akunt. Dan ….

Sari, M., Asmendri, A., 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Nat. Sci. J. Penelit. Bid. IPA Dan Pendidik. IPA 6, 41–53.

Sari, N.P., 2020. Hasil Survei PBB, "e-Government" Indonesia Naik Peringkat [WWW Document]. Kementeri. Pendayagunaan Apar. Negara Dan Reformasi Birokrasi. URL https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat (accessed 7.9.21).

Setiawan, W., 2017a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [WWW Document]. E-Gov. URL https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government (accessed 6.29.21).

Setiawan, W., 2017b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [WWW Document]. URL https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government (accessed 7.9.21).

Silalahi, M., Napitupulu, D., Patria, G., 2015. KAJIAN KONSEP DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA. JUPITER 1.

Siyoto, S., Sodik, A., 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Sofiah, R., Suhartono, S., Hidayah, R., 2020. Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. Pedagogi J. Penelit. Pendidik. 7.

Sosiawan, E., 2015. Evaluasi implementasi e-government pada situs web pemerintah daerah di Indonesia: Prespektif content dan manajemen. Semin. Nas. Inform. SEMNASIF.

Sosiawan, E.A., 2020. Penggunaan Situs Jejaring Sosial sebagai Media Interaksi dan Komunikasi di Kalangan Mahasiswa. J. Ilmu Komun. 9, 60–75. https://doi.org/10.31315/jik.v9i1.3416

Sosiawan, E.A., 2015. Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. Semin. Nas. Inform. Semnasif 1.

Sudarsono, B.G., Lestari, S.P., 2018. Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government. Komik Konf. Nas. Teknol. Inf. Dan Komput. 2. https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.981

Supriyanto, E.E., 2016. Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. JIP J. Ilmu Pemerintah. Kaji. Ilmu Pemerintah. Dan Polit. Drh. 1, 141–161. https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161

Susanti, E., Harta, R., Diana, B.A., Utami, S.B., 2021. E-Readiness and The Effectiveness of E-Participation in Indonesia. Mimb. J. Sos. Dan Pembang. 37.

Suyitno, 2018. Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya. Akademia Pustaka, Tulungagung.

Syamsul, S., Zuhroh, S., 2021. Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. J. Ris. Terap. Akunt. 5, 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.4719373

Thomas, M., 2004. Is Malaysia's MyKad the "One Card to Rule Them All"? The Urgent Need to Develop a Proper Legal Framework for the Protection of Personal Information in Malaysia. undefined.

United Nations, 2020. E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response.

Utama, G.S., 2020. Pelaksanaan e-Government di Indonesia. Unair News. URL http://news.unair.ac.id/2020/12/22/pelaksanaan-e-government-di-indonesia/ (accessed 1.15.22).

Wardiana, W., 2002. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia.

Wirawan, V., 2020. Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. J. Penegakan Huk. Dan Keadilan 1, 1–16. https://doi.org/10.18196/jphk.1101

Yovita, yovita, 2016. Implementasi Penerapan E-Government, Sistem Pemerintahan Riau yang Moderen [WWW Document]. Website Resmi Kementeri. Komun. Dan Inform. RI. URL http:///content/detail/8522/implementasi-penerapan-e-government-sistem-pemerintahan-riau-yang-moderen/0/sorotan_media (accessed 7.4.21).

Yuliyana, I., Setyaningrum, D., 2016. Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga, in: Seminar NasionalAkuntansi XIX. pp. 1–25.

Yunita, N.P., Aprianto, R.D., 2018. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website, in: Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi. pp. 23–24.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen

Instruksi Presiden nomor 13 tahun 2003 tentang menyebutkan kebijakan dan strategi nasional dan pengembangan *E-government.*

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.